

**PENGARUH KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN
PIMPINAN DPRD BAGI PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Terhadap Disparitas Pegusulan Ketua DPRD Kayong Utara)**

**ALHUSAINI. SH.
A.2021141078**

Pembimbing I : Prof. Dr.H. Garuda Wiko, SH.MSi
Pembimbing II : Mawardi, SH.MHum

ABSTRACT

This thesis focuses on the influence of political parties in the internal conflict of the nomination of the leadership of Parliament for the regional administration. From the study authors using normative juridical research method, the conclusion: that 1). Construction is contained in article 164 and article 165 of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government only administratively wrote. Within the meaning of these articles only regulate how to determine candidates for the leadership of Parliament on condition that the vote general election results obtained by each political party. The most votes storied be decisive to occupy the leadership of Parliament. Then the solution is regulated in Law No. 2 of 2008 on Political Parties as amended by Law No. 2 of 2011 if there is a conflict in the internal political party that is completed by the political parties themselves by basing on the Statutes and Bylaws and as institution resolving disputes internal conflicts of political parties was submitted to the Court a party formed by the political parties themselves. If the matter is not resolved by the Court Party, the Institute for Court becomes the exit to resolve the internal conflict of the political party. 2) internal .konflik particular political party to propose and determine the leadership of Parliament directly or indirectly influence in local governance. This is due to Parliament is a partner of the local government and at the same as the regional administration. Furthermore, of the rights and duties and the authority of the parliament and then accelerated to the rights and the duties and authority of the head of the region, then there is a very close working relationship in governance in the region. Every action and authority possessed by the head of the region has always been linked to parliament, both in order to give consideration and approval. The relationship of labor and employment partner at the same time, the institution of Parliament concerning the status of members and leaders should have any legal standing or position that has been legalized. If the leadership of Parliament is not yet definitive, all the regional administration will stagnate because of the institutional, Parliament does not have the leadership. Leader while Parliament is generally only serves to organize and carry out in the framework of a definitive determination of the leadership of Parliament. 3). In the law of political parties No. 2 of 2008 as amended by Law No. 2 of 2011 that the mechanisms for resolving conflicts of political parties can be completed with two (2) ways namely through Supreme Party or other designations established by the political party concerned and agencies pengadilan.Di outside of legislation governing political parties in the conflict resolution, Nasikun provide a model on the settlement of the conflict. There is also an offer from Nasikun in conflict resolution are: conciliation, mediation, abitrased and perwasian. But the writer believes there are only two (2) models that can be used to resolve internal conflicts of political parties namely conciliation and mediation. The suggestions are: 1). political parties in determining the leadership of Parliament do not be concerned with the interests of individuals or groups because the longer the old parties of political parties propose and determine the leadership of Parliament, it can affect the head of administration of blood. 2) .had no revisions back to the law of political parties by entering the model or form or other means other than the Party and resolved by the Supreme Court Institute, that political party's internal conflict resolution can be solved in an easy manner and did not take long.

ABSTRAK

Tesis ini menitikberatkan pada pengaruh konflik internal partai politik dalam pengusulan pimpinan DPRD bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: bahwa 1). Konstruksi yang terdapat dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bersifat administratif aja. Dalam arti pasal-pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan calon pimpinan DPRD dengan syarat perolehan suara hasil pemilihan umum yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki pimpinan DPRD. Kemudian solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika terjadi konflik dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sebagai lembaga pemutus atas sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan pada Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika pun tidak terselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka Lembaga Pengadilan menjadi pintu keluar untuk menyelesaikan konflik internal partai politik tersebut. 2).konflik internal partai politik khususnya untuk mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD secara langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah dan sama sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya dari hak-hak serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan kemudian diakselerasikan dengan hak-hak serta tugas dan wewenang kepala daerah, maka terdapat hubungan kerja yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan. Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja, maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai legal standing atau kedudukan yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum bersifat definitif, maka segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena secara kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD secara umum hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif. 3). Di dalam undang undang partai politik nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik partai politik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan serta lembaga pengadilan. Di luar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian konflik partai politik, Nasikun memberikan model terhadap penyelesaian konflik. Ada pun tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah : konsiliasi, mediasi, arbitrase dan perwasian. Akan tetapi penulis berpendapat hanya terdapat 2 (dua) model saja yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik yakni konsiliasi dan mediasi. Saran-saran adalah : 1). partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD jangan mementingkan kepentingan perorangan atau golongan karena semakin lama partai lama partai politik mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD maka dapat berpengaruh kepala penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2). harus ada revisi kembali terhadap undang-undang partai politik dengan memasukkan model atau bentuk atau cara lain selain diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan Lembaga Pengadilan, agar penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan cara yang mudah serta tidak memakan waktu yang cukup lama.

A. Latar belakang Penelitian

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut, kehidupan politik era reformasi telah memunculkan banyak partai politik dalam kancah politik nasional. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia sedang menjalani transisi politik menuju perubahan besar dalam berdemokrasi. Kehidupan multi partai dewasa ini mengandung dua implikasi; disamping dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik karena memang substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, namun stabilitas politik nasional menjadi rentan karena suara rakyat yang menjadi sumber kekuasaan politik terpecah.

Meskipun demikian, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai media meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisip[asi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b).

memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b). penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. c). penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d). partisipasi politik warga negara Indonesia e). rekrutment politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu media untuk mewujudkan tujuan dan fungsi dari partai politik tersebut adalah dengan mengerahkan dan mengarahkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada untuk menduduki kursi dan menempatkan kader-kader pada posisi-posisi tertentu di parlemen, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adanya kader-kader yang menduduki dan ditempatkan pada posisi strategis di parlemen akan menunjukkan eksistensi sebuah partai politik yang berujung pada pernyataan simbolik adanya “kekuatan yang setara “ dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini terjadi, karena setiap perencanaan dan program kerja yang akan dituangkan dalam suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah harus melalui persetujuan atau pertimbangan parlemen, karena pada prinsipnya parlemen selalu berbanding lurus dengan partai politik.

Menyangkut kelembagaan parlemen atau yang lebih populer di sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengatur tentang komposisi jabatan-jabatan strategis yang merupakan bagian dari Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat/ Daerah. Regulasi untuk penempatan kader partai politik pada posisi-posisi jabatan startegis tersebut sudah di atur

secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sudah menjadi keharusan jika peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi dasar dan pedoman bagi partai politik untuk menempatkan kadernya di posisi-posisi jabatan strategis agar tidak terjadi konflik antar partai politik ataupun internal partai politik. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terjadi konflik internal partai politik dalam hal ini Partai Demokrat menyangkut penempatan posisi pimpinan DPRD yakni di DPRD Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 264/SK/DPP.PD/2014 mengusulkan **M. Sukardi** sebagai Ketua DPRD Kayong Utara periode 2014-2019. Dilain pihak, DPD Partai Demokrat melalui surat Nomor : 030/EXT/DPD.PD/Kalbar/X/2014 dan DPC Partai Demokrat melalui surat Nomor : 026/DPC.PD/KKU/X/2014 merekomendasikan **Sarnawi** sebagai Ketua DPRD Kayong Utara. Kondisi ini tentu menimbulkan disparitas terhadap pengusulan pimpinan DPRD sebagai Ketua DPRD yang diusulkan oleh Partai Demokrat. Adanya 2 (dua) nama yang di usulkan oleh Partai Demokrat ini tentu menimbulkan kosekuensi bagi Ketua Sementara DPRD Kayong Utara yakni tidak berani mengambil sikap untuk mengumumkan pada rapat paripurna atas usulan atau rekomendasi pimpinan Partai Demokrat untuk menetapkan Ketua definitif DPRD Kayong Utara.

Norma-norma yang mengatur penempatan pimpinan DPRD terdalam di dalam pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : **(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:** a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan b. 1 (satu) orang ketua dan 2

(dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. **(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.** Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 164 ayat (2) dinyatakan : Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, **melalui pimpinan partai politik setempat** mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.

Kemudian dalam Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya.

Melihat norma yang terdapat dalam pasal 164 ayat (2) beserta penjelasannya, maka secara tersurat dapat dikatakan bahwa DPP Partai Demokrat seharusnya tidak boleh melakukan Intervensi dalam menempatkan dan menentukan kader untuk menjadi Pimpinan DPRD Kayong Utara. Hal ini disebabkan penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang berhak mengajukan berupa usulan untuk menjadi pimpinan adalah **melalui pimpinan partai politik setempat.** Kata “setempat” berarti mengandung arti wilayah dimana partai politik tersebut memperoleh suara dan mendapatkan kursi di lembaga DPRD. Dengan demikian, ketua DPC Partai Demokrat Kayong Utara yang berhak untuk

mengusulkan atau merekomendasikan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD atau Ketua DPRD kayong Utara.

Atas konflik internal partai politik di dalam tubuh Partai Demokrat dalam menentukan dan menempatkan kader untuk menjadi Ketua DPRD, tentu akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kayong Utara. Di dalam konstitusi (UUD 1945) beserta Undang-undang organik yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini artinya, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan urusan pemerintahan tanpa keikutsertaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitu juga sebaliknya.

Belum terbentuknya secara definitif apalagi masih ada konflik internal di tubuh partai politik dalam menentukan dan menempatkan pimpinan DPRD Kayong Utara akan membuat lembaga DPRD akan kehilangan substansi, karena para pimpinan DPRD tidak bisa bekerja karena belum adanya Ketetapan DPRD yang bersifat tetap sebagai legal standing dan tidak ada Keputusan dari Gubernur sebagai kepala Daerah yang meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD. Situasi ini akan menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan rapat-rapat atau pembahasan-pembahasan baik menyangkut Rencana Anggaran dan Belanja Daerah yang harus disetujui secara bersama oleh DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah, serta komisi-komisi DPRD yang pasti belum terbentuk sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah serta perencanaan program legislasi daerah dan lain-lain.

Untuk memaparkan lebih luas lagi sebagaimana uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dalam bentuk tesis dengan judul “ PENGARUH KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PIMPINAN DPRD BAGI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Terhadap Disparitas Pegusulan Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara)”.

B. Permasalahan Penelitian.

Dari uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan telah mengatur penyelesaian konflik internal partai politik dalam pengusulan/penempatan pimpinan DPRD.
2. Apakah konflik internal partai politik dalam pengusulan/penempatan pimpinan DPRD berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bagaimana model penyelesaian konflik internal partai politik dalam pengusulan/penempatan pimpinan DPRD sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara baik.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan Pimpinan DPRD Dalam Peraturan Perundang Undangan.

Konflik antar partai politik dalam menjaga kepentingan masing-masing berpulang pada tujuan dari masing-masing partai politik itu sendiri dan tentu terkait dengan eksistensi dari negara yang mempunyai tujuan mulia demi mensejahterahkan rakyat. Jika kepentingan nasional dalam berbangsa dan bernegara menjadi tujuan utama dan bukan politik kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan maka stabilitas politik dalam negara akan dapat terwujud.

Kadang kala konflik antar partai politik, diikuti juga dengan adanya konflik internal dalam partai politik. Konflik internal partai politik pada umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang secara empiris terjadi adalah dalam menempatkan pimpinan DPRD. Konflik bisa terjadi karena disebabkan 2 (dua) hal : Pertama, menyangkut pada tafsir yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasar dari penempatan pimpinan DPRD dan kedua ; menyangkut pada figur yang calon pimpinan DPRD yang diusung oleh Dewan pimpinan di daerah dengan calon pimpinan yang disetujui oleh dewan pimpinan pusat.

Terkait penempatan pimpinan DPRD, regulasi yang mengatur terdapat di dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

Pasal 165

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari
- (3) 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Kemudian dalam Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya.

Konstruksi yang terdapat dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bersifat administratif aja. Dalam arti pasal-pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan calon pimpinan DPRD dengan syarat perolehan suara hasil pemilihan umum yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki pimpinan DPRD.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 164 ayat (2) dinyatakan : Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Penjelasan pasal 164 ayat (2) memberikan gambaran bahwa untuk menjadi pimpinan DPRD tidak ditentukan apakah calon pimpinan merupakan ketua Cabang atau Ketua DPD dari suatu parpol atau tidak, yang terpenting untuk menjadi pimpinan DPRD calon yang bersangkutan harus seorang anggota DPRD, hanya pengusulannya saja yang dilakukan oleh pimpinan partai politik setempat.

Mekanisme pengusulan pimpinan DPRD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi untuk menentukan siapa calon yang diusulkan oleh pimpinan partai politik setempat untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD ternyata tidak diatur lebih

lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa siapa yang akan diusulkan menjadi pimpinan DPRD, menjadi kebijakan internal partai politik yang bersangkutan.

Mekanisme internal partai politik inilah, pada tataran empirik menimbulkan persoalan dalam pengusulan pimpinan DPRD sehingga pimpinan definitif DPRD sampai pada waktunya belum terbentuk dan belum disahkan serta diresmikan oleh Gubernur. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat dimana berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 264/SK/DPP.PD/2014 mengusulkan **M. Sukardi** sebagai Ketua DPRD Kayong Utara periode 2014-2019. Di lain pihak, DPD Partai Demokrat melalui surat Nomor : 030/EXT/DPD.PD/Kalbar/X/2014 dan DPC Partai Demokrat melalui surat Nomor : 026/DPC.PD/KKU/X/2014 merekomendasikan **Sarnawi** sebagai Ketua DPRD Kayong Utara. Permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik ditataran internal partai demokrat dan dilanjutkan ke ranah hukum melalui jalur pengadilan.

Siapa calon yang menduduki jabatan pimpinan DPRD dari Partai Demokrat terjawab setelah adanya Keputusan DPRD Kayong Utara Nomor 23 tahun 2015 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2014-2019 telah menetapkan Saudara Sukardi, SE.MM sebagai Ketua DPRD dan saudara Alias dan Tajudin, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD. Atas penetapan tersebut, maka Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Nomor :64/PEM/2015 meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kayong Utara untuk masa jabatan 2014-2019.

Posisi Gubernur dalam meresmikan pimpinan DPRD bertindak sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, Gubernur mempunyai kewenangan :

- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Frase huruf e tersebut memberikan kewenangan secara khusus bagi Gubernur untuk meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD melalui pasal 165 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil PemerintahPusat”.

Meskipun permasalahan penetapan definitif pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara telah selesai dengan adanya Keputusan DPRD Kayong Utara dan Keputusan Gubernur, namun secara yuridis perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang mengatur jika terjadi konflik internal di suatu partai politik. Di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 khusus pada psal 32 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa “ (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika terjadi konflik dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sebagai lembaga pemutus atas sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan pada Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika pun tidak terselesaikan oleh

Mahkamah Partai, maka Lembaga Pengadilan menjadi pintu keluar untuk menyelesaikan konflik internal partai politik tersebut.

2. Pengaruh Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan Pimpinan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Meriam Budiardjo¹ meliputi sarana (1) komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (3) rekrutmen politik (4) pengatur konflik. Ke 4 (empat) fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama dengan lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai sangat berperan dalam mengartikulasikan kepentingan yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai macam kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mampu mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Untuk komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Untuk sosialisasi politik ini, partai politik berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Sebagai rekrutmen politik, partai politik dibentuk memang untuk menjadi untuk menjadi kendaraan yang sah menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Dan sebagai pengatur dan pengelola konflik, partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik partai.

Dalam kenyataan, partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi sejatinya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan

¹ Meriam Budiardjo, Op Cit hal. 163-164

pengurusnya sendiri. Untuk mengatasi potensi buruk partai politik tersebut, diperlukan beberapa mekanisme penunjang yakni perlunya sistem kode etik positif yang dituangkan sebagai Code of ethics, lalu code of laws yang tertuang dalam anggaran dasar serta code of conduct yang tertuang dalam anggaran rumah tangga.²

Ke 3 (tiga) instrument ini diperlukan untuk tidak terjadi konflik antara partai dan lebih jauh tidak terjadi konflik dalam internal partai politik. konflik internal partai politik khususnya untuk menentukan pimpinan DPRD tentu berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah karena rumusan pemerintah daerah di berikan pengertian sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, baik pemerintah daerah dan DPRD sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Di dalam Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi :a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;b. anggaran; dan c. pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan menjaring aspirasi masyarakat.

Pada fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
- b. mengajukan mengajukan usul rancangan Perda ; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah.

² Jimly ashiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konsititusi Pers, 2006, hal. 330-331

Untuk fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda APBD ;
- c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD ; dan
- d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Selanjutnya, pada fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana huruf c di atas, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan., lalu melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan selanjutnya DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain hak-hak yang dimiliki DPRD tersebut, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota juga mempunyai tugas dan wewenang

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. dihapus.
- d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah selaku kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. dihapus.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut . kepala daerah berwenang :

- a. mengajukan rancangan Perda,
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari hak-hak serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan selanjutnya diakselerasikan dengan hak-hak serta tugas dan wewenang kepala daerah, maka terdapat hubungan kerja yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap

tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan.

Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja, maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai legal standing atau kedudukan yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum bersifat definitif, maka segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena secara kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD secara umum hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif.

Pimpinan DPRD meskipun bersifat coligeal, mempunyai pengaruh yang cukup besar secara kelembagaan. Hal ini disebabkan, karena seluruh kegiatan DPRD dalam menjalankan hak-hak serta tugas dan wewenang harus sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan. Dengan demikian, adanya konflik internal partai politik dalam menempatkan pimpinan DPRD jelas sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Model Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan Pimpinan DPRD.

Coser (dalam Irving) menyatakan konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.³ Selanjutnya Dahrendorf (dalam George Ritzer) membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota

³ Irving M. Zeitlin, Loc Cit, hal 156

yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.⁴

Dalam konteks, konflik internal partai Demokrat dalam menentukan pimpinan DPRD di Kabupaten Kayong Utara dengan meminjam istilah dari Dahrendorf, maka dapat dikualifikasikan sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang berada dibawah naungan DPP dan kelompok kepentingan yang berada di DPD atau DPC. Apabila melihat aturan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya yang mengajukan untuk dijadikan pimpinan DPRD adalah DPC. Namun demikian, karena adanya kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan DPP maka aturan di dalam pasal 164 ayat (2) ditafsirkan berbeda. Selain itu, argumentasi yang sangat bertolak belakang dan menyimpang dari peraturan adalah bahwa DPC harus mengikuti instruksi dari DPP.

Dalam hal-hal tertentu dan tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka sudah kewajiban dari DPD maupun DPC untuk mengikuti perintah ataupun instruksi dari DPP, namun apabila telah diatur apa yang menjadi kewenangan dari setiap DPC dalam peraturan perundang-undangan, sudah selayaknya DPD ataupun DPC dapat mengabaikan perintah atau instruksi dari DPP.

Atas konflik yang terjadi di internal partai demokrat tersebut, tentu membutuhkan jalan atau mekanisme dalam menyelesaikannya. Di dalam undang undang partai politik nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik partai politik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan serta lembaga pengadilan.

⁴ George Ritzer, Douglas J. Goodman, Loc Cit,hal. 153

Sebagai benteng keadilan internal, Mahkamah Partai menjadi tempat pertama seluruh fungsionaris maupun anggota partai mengadu dan menggugat untuk membela hak-haknya atas perbuatan dan tindakan pengurus. Secara kelembagaan kedudukannya Mahkamah Partai mandiri (impartial) untuk menjamin kemerdekaan atas kewenangannya dalam memutus perkara yang diperselisihkan. Fungsionaris partai dan seluruh anggota bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan partai. Tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Anggota dan pengurus tidak lagi tergantung pada kebaikan figur-figur tertentu dalam partai yang mengendalikan partai secara personal (*rule of man*) tetapi semuanya bergerak dan bertindak di bawah hukum dan AD-ART partai sebagai dasar hukum penyelenggaraan seluruh fungsi, tugas dan wewenang partai (*rule of law*). Kehadiran Mahkamah Partai sebagai delegasi negara tidak terlepas atas fungsi publik yang dijalankan oleh partai. Keberadaannya untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang-orang yang tergabung di dalam partai dari kemungkinan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh fungsionaris partai. Memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap anggota, terutama anggota yang sedang dalam jabatan-jabatan publik pemerintahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kompetensi Mahkamah Partai tidak secara detil dan rinci diuraikan dalam undang-undang tersebut kecuali dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART Partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik yang meliputi: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalagunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, dan 6) keberatan terhadap keputusan partai politik. Pada ayat

(5) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Di luar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian konflik partai politik, Nasikun⁵ memberikan model terhadap penyelesaian konflik. Ada pun tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah :

1. Konsiliasi yaitu pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
2. Mediasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
3. Arbitrase yaitu lembaga resmi berupa pengadilan dimana hakim yang akan mengambil putusan atas konflik yang terjadi.
4. Perwasitan yaitu kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Menurut hemat penulis, dari keempat tawaran model penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Nasikun, hanya terdapat 2 (model) yang dapat dijadikan rujukan untuk penyelesaian konflik internal partai politik, yakni konsiliasi dan mediasi.

⁵ Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Loc Cit , hal.25.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa Konstruksi yang terdapat dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bersifat administratif aja. Dalam arti pasal-pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan calon pimpinan DPRD dengan syarat perolehan suara hasil pemilihan umum yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki pimpinan DPRD. Kemudian solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika terjadi konflik dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sebagai lembaga pemutus atas sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan pada Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika pun tidak terselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka Lembaga Pengadilan menjadi pintu keluar untuk menyelesaikan konflik internal partai politik tersebut.
2. konflik internal partai politik khususnya untuk mengusulkan pimpinan DPRD secara langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah dan sama sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya dari hak-hak serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan kemudian diakselerasikan dengan hak-hak serta tugas dan wewenang kepala daerah, maka terdapat hubungan kerja yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan. Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja,

maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai legal standing atau kedudukan yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum bersifat definitif, maka segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena secara kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD secara umum hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif.

3. Di dalam undang undang partai politik nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik partai politik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan serta lembaga pengadilan. Di luar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian konflik partai politik, Nasikun memberikan model terhadap penyelesaian konflik. Ada pun tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah : konsiliasi, mediasi, arbitrase dan perwasian. Akan tetapi penulis berpendapat hanya terdapat 2 (dua) model saja yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik yakni konsiliasi dan mediasi.

B. Saran-saran

1. partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD jangan mementingkan kepentingan perorangan atau golongan karena semakin lama partai lama partai politik mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD maka dapat berpengaruh kepala penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. harus ada revisi kembali terhadap undang-undang partai politik dengan memasukkan model atau bentuk atau cara lain selain diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan Lembaga Pengadilan, agar penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan cara yang mudah serta tidak memakan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, Hukum dan Pemerintahan Daerah, Duta Ilmu Press, 2009
- Arbi Sanit ,Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan 2000
- Abu Daud Busreh & Abubakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991
- Andi Hamzah, Kemandirian dan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman, Makalah disampaikan pada Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta: PSHTN UI, 2005
- A.S.S. Tambunan, Pemilu Di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Bandung; Bina Cipta, 2001
- , Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945 Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997
- Budi Setiyono dan Bonie Triyana (penyunting), "Amanat PJM Soekarno di Hadapan Para Pemimpin dari 7 Partai Politik di Guest House Istana Presiden, Jakarta 27 Oktober 1965
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998
- B. Hestu Cipto Handoyo, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003)
- Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Burhan Djabir Magenda, Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Proses Integrasi Nasional, (Makalah) Pidato Ilmiah Pada APDN Mataram, 1986

- Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2009
- , Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2009
- , Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 2008
- , Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Artikel Jurnal Bisnis dan Birokrasi , No. 1/Vol.I, 1999
- Carl J. Fredrich, Constitution Government and Democracy: The Theory and Practice In Europe Of Citizens More or Les Organized, Blaisdell Publishing Company 1967
- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2002
- Dwi Andayani Budisetyowati, Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Roda Inti Media, Jakarta, 2009
- Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, (Jakarta: Angkasa Raya, 1992
- Djokosoetono, Hukum Tata Negara, dihimpun oleh Harun Alrasid, Edisi Revisi Jakarta: Ind-Hill Co, 2006
- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2003
- Daniel S. Lev, "Political Parties in Indonesia", dalam Party Systems of Southeast Asia. Terbitan Khusus dari Journal of Southeast Asian History, Maret 1967
- Daniel Dhakidae, "Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-patahan Sejarah," dalam Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program, Jakarta: Kompas, 1999
- Etin Nurhaetin, Analisis Penurunan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta, Tesis Magister, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2005
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Eep Saefullah, Pemilu dan Demokrasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1997

- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1993
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- GTZ-SFDM, *Naskah Akademis : Isu Kewenangan, Masukan Untuk Penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999*, Jakarta, 2002
- G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* , Ithaca: Cornell University Press 1954; Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Herbert Feith, “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar:, Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai, (Miriam Budiardjo) Yayasan Obor, Jakarta 1998
- Harmaily Ibrahim dan Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI, Jakarta : 1978.
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1998
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Dimuat dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2 (BPHN: Jakarta: Tahun 2003)*
- , *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004* dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004*.
- , *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- , *Konsitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah. Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kelapa Daerah*, Alumni, Bandung, 2008
- Joenirto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara* (Jakarata; Renike Cipta, 1990
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang ,2002
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Dharmono Hardjowidjono), Yogyakarta: Gajah Mada Univeisty Pers, 1995.
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998

- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1986
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Cet. VI, Jakarta: Gramedia, 1989
- M. Rusli Krim, Pemilu Demokrasi Kompetitif (yogyakarta; Tiara Wacana, 1991
- Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009
- Oentarto Sindung Mawardi, Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Permasalahan dan Tantangan, Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Jakarta, 27 Nopember 2002
- O' Donnel dan Philippe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi; Rangkuman Kemungkinan dan Ketidakpastian, Jakarta: LP3ES, 1993
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, Kisah Mini Sistem Kepartaian, Closs, 2003
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bany Quraisy, bandung, 2005
- Parulian Donald, Menggugat Pemilu Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Philip Mawhod dalam Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Robert lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, universitas terbuka Jakarta 1994
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penemuan Hukum, , Ghalian Indonesia, Jakarta 1982
- Romli Atmasasmita, Reformasi Huku, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001
- R. Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Riswhandha Imawan dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2005
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo, 1992

- SB Yudhoyono, menitik beratkan reformasi sebagai suatu proses perubahan yang berkesinambungan tetapi tetap memiliki prioritas yang pasti. Sekaligus harus mampu dikendalikan karena reformasi berbeda dengan revolusi. SB Yudhoyono, ABRI Profesional dan Dedikatif, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Sigmund Neumann, Modern Political Parties, in Comparative Politics: a Reader, Harry Eckstein and David E. Apter (eds), London: The Free Press of Glencoe, 1963
- Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni, 2006.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005
- Sodjuangan Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota, Disertasi universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
- Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, Dibawah Bendera Revolusi, Djakarta: Panitia Penrebit Dibawah Bendera Revolusi 1965
- Soerjono Soenkanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995
- S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962
- Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, Jakarta: Integrita Perss, 1984
- Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Hasan Basri), Jakarta: LP3ES, 1986
- Umaidi Radi, Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, (Jakarta Integritas Press, 1984
- W. Riawan Tjandra, Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004

Wawan Sobari dkk, Inovasi Sebagai Referensi, Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award, Jawa Post Institut of Pro-Otonomi, Surabaya, 2004

Yesmil Anwar&Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum PidanaJakarta : Grasindo,2006

Peraturan Perundangan

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.